

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anas Mohamad et al. *Kewarganegaraan Identitas Kebangsaan dan Nilai Keindonesiaan*. Madani, Malang, 2017.
- Ali, Achmad. *Menguak Realitas Hukum*. Cet.1. Prenada Media Group. Jakarta, 2008.
- Bahder Johan Nasuyion , *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- _____. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet. II. CV Mandar maju. Bandung, 2016.
- Berry, David. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Rajawali. Jakarta.1981.
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi: Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta. 2006.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Cet. I., Jakarta, Kencana, 2008.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-undangan I (Jenis Fungsi materi Muatan)*. Kanisius. Yogyakarta. 2007.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2015.
- Hicks, Herbert G dan C. Ray Gullet, *Organisasi Teori dan Tingkah Laku*. Cet. II, Bumi Askara, Jakarta, 1995.
- Muhyadi, *Organisasi Teori, Struktur dan Proses*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta, 1989.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lubis, Hari dan Huseini, Martani, *Teori Organisasi; Suatu Pendekatan Makro*, Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial UI, Jakarta, 1987.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Nurmawati, Made dan I Gede Marhaendra Wija Admaja. *Jenis Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan*, Fakultas Hukum, Udayana, 2017.
- Ochtorina Dyah Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*.

Sinar Grafika Offcet, Jakarta, 2015.

Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2015.

Rawi John, *Teori Keadilan dasar-dasar Filsaat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Sanit Arbi, *Swadaya Politik Masyarakat*. Rajawali. Jakarta, 2006.

Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

Sugianto Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Syani Abdul, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, Bumi Aksara, Bandung, 2012.

B. Jurnal

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safaat. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*. Cet.1. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. 2006.

Bintarno. Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Karena Kealpaannya Mengakibatkan Korban Ringan Dan Kerusakan Barang Serta Korban Meninggal Dunia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 13, Nomor 1, 2018.

Cornelesz, Ade Tiara puteri. *Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional*. Lex Et Societatis Vol. VI No. 6, 2018.

Hasim, Hasannudin. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem. *Madani Legal Review*. Vol.1 No.2. Tahun 2017.

Hendriansyah, Ari Ganjar dan Rendi. *Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia*. Sosioglobal. Vol.1 No.1. 2016.

Mulyadi, *Organisasi Teori Struktur dan Proses*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Tinggi, Jakarta, 1989.

Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral

DPR RI, *“Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dompot Dhuafa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat”*, Vol. III. No. 2. Jakarta, 2012,

Ridlwan, Zulkarnain. *“Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat,”* Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5 No. 2, 2012
Catur Wibowo dan Herman Harefa, *“Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah”*. Jurnal Bina Praja. Vol. 7 No. 1, 2015.

Suryadi, Adi Rekonstruksi Civil Society Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia. Pustakan LP3S Indonesia. Jakarta. 2006.

Wibowo, Catur. dan Herman Harefa, *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah*. Jurnal Bina Praja, Vol. 7 No. 1. 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tim Perizinan dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Bagi Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.

Tri Pranadji. Naskah Akademik RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan, Jakarta. 2012.

D. Internet

Nursadi, Erdy. Waspada Ormas Asing. tersedia di <https://republika.co.id/berita/oizqc625/waspadai-ormas-asing> di akses tanggal 06 November 2020.

Organisasi Internasional Non Pemerintah di Indonesia, diakses pada tanggal 7 November pukul. 14.00. https://ingo.kemlu.go.id/ingo_list/index/3.

Mursitama, Tirta Nugraha. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2011. <http://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-1.pdf>

Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah di Indonesia, Direktorat Sosial budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 2011. <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9CdWt1L1Nvc2J1ZCUyME9JTklvRGlyZWt0b3JpJTIwT3JnYW5pc2FzaSUyMEludGVybmFzaW9uYWwIMjBOb24tUGVtZXJpbmRhaCUyMGRpJTIwSW5u6ykb25lc2l hLnBkZg>.